

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan proses pengendalian yang dikemukakan oleh Stooner<sup>1</sup> menunjuk pada empat variable krusial mengenai pengendalian yang berperan penting dalam optimalnya Pendendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yaitu melalui Penentuan Standar dan Metode Pengukuran Prestasi Kerja, Pengukuran Prestasi Kerja, Perbandingan antara Hasil Pengukuran dengan Standar yang telah ditetapkan dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Meskipun Lurah beserta aparatur Kelurahan Dago telah melakukan ke-empat tahap proses pengendalian tersebut, namun belum dilakukan secara optimal karena masih lemahnya penyerapan anggaran, banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi, seperti oleh Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
  - a. Pada konteks penetapan standar oleh Pemerintah Kota Bandung yang kurang jelas bagi tugas pokok dan fungsi setiap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan PIPPK tersebut. Selain itu, ketidakjelasan regulasi juga pada Lurah selaku pihak yang paling dekat dengan masyarakat

---

<sup>1</sup> A.F Stoner James, dkk, Manajemen Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta : PT Perhallindo 1996) hlm.248

di Kelurahan, namun, pengendalian penuh diberikan kepada Kecamatan. Dalam standar tersebut, yakni Peraturan Walikota Bandung No. 436 Tahun 2015, menjelaskan bahwa dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan baik Lemabaga Kemasyarakatan RW dan LPM keduanya memiliki fungsi mengadakan perbaikan infrastruktur, namun ketika keduanya mengajukan, salah satunya pasti akan ditolak. Dengan standar yang kurang jelas tersebut, membuat Lemabaga Kemasyarakatan kebingungan dalam merancang program kerja, sehingga akibatnya, banyak anggaran yang tidak terserap dan kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi oleh LK tersebut.

- b. Pada konteks melakukan pengukuran prestasi kerja, pengukuran terhadap standar keberhasilan program Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan adalah penyerapan anggaran. Dalam hal ini, apabila penyerapan anggaran PIPPK berhasil terserap diatas 90%, maka Lembaga Kemasyarakatan selaku pengguna anggaran telah berhasil melaksanakan program tersebut. Namun, apabila penyerapan hanya sebetas 60% seperti yang terjadi pada LPM dan Karang Taruna, maka kedua Lembaga Kemasyarkatan tersebut dikatakan belum optimal. Oleh karena itu, peran Lurah sebagai pengawas dan pemantau sangat diperlukan. Pengawasan dilakukan setiap adanya kegiatan yang dilaksanakan. Namun, pengawasan yang dilakukan belum dapat dikatakan optimal karena pengawasan sangat lemah, yakni seringnya lurah tidak melakukan pengawasan secara langsung kepada LK-LPM dan LK-Karang Taruna,

dalam hal ini tidak dilakukan secara periodik, akibatnya belum dapat menghasilkan penyerapan anggaran yang cukup besar dari kedua LK tersebut.

- c. Pada konteks Perbandingan antara Standar dan Hasil Prestasi Kerja evaluasi yang dilakukan pun tidak berjenjang dan tidak menyeluruh, yakni evaluasi rutin hanya dilakukan pada LK-RW dan LK-PKK. Adapun LK-Karang Taruna dan LK-LPM jarang sekali dilakukan evaluasi rutin. Hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan tindakan korektif yakni meningkatkan kerjasama Lurah dan LK untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
  - d. Dalam konteks tindakan korektif dari hasil pertimbangan berupa, peningkatan kerjasama antara Lurah dengan LPM dan Karang Taruna dengan bisa melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap kedua LK tersebut.
2. Dalam melakukan Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Koa Bandung terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yaitu sarana dan prasana yang sudah memadai. Sedangkan faktor penghambat pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung belum optimal disebabkan karena ketidakjelasan regulasi pemerintah yang

menyebabkan kegiatan sulit dilaksanakan dan penyerapan anggaran sulit dilakukan, dan sumber daya manusia yang kurang memadai, dalam hal ini aparatur kelurahan yang memiliki ekstra kerja dalam mengelola PIPPK.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Lurah untuk mengatasi hambatan-hambatan pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yaitu Aparatur kelurahan yang terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan mengangkat sukarelawan pada Kelurahan Dago.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Akademis**

Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambah variabel lain serta pendekatan lainnya selain pengendalian, seperti Implementasi Kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian manajemen dan kebijakan pemerintahan.

### **5.2.2. Praktis**

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bandung sebaiknya lebih memperhatikan perbedaan tugas pokok dan fungsi setiap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan PIPPK.

2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam Pelaksanaan PPPK tidak hanya memfokuskan pada penyerapan anggaran, tetapi seabiknya lebih memperhatikan hasil kegiatan yang dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan PIPPK seabiknya dilakukan evaluasi rutin pada setiap Lembaga Kemasyarakatan.
4. Dalam melakukan pengendalian, Lurah seabiknya dapat memberikan sanksi tegas pada Lembaga Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan PIPPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.